

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Ubaedillah, Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: Kencana, 2015), hal: 209
- LAN. 2003. Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. hal 7
- Santosa, P. (2008). Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama. hal 55
- Sedarmayanti, Reformasi Administarsi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepimpinan Masa Depan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 276-283.
- Sastrawan, B & Nilam, C. Konsep Hukum Islam Dalam Menata Clean Government dan Good Government Di Indonesia.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Susetiawan. 1998. Clean Government dalam Wajah Birokrasi.
- Bappenas. 2004. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang Baik. Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik.
- Mustafa, Delly.2013, Birokrasi Pemerintahan, Bandung : CV. Alfabeta
- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, cet. III, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).
- C.S.T.Kansil, Cristine S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, cet. III, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Haw. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007 ), , Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu- ilmu Sosial, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010 ).
- Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andiffset, 2010).

### **Jurnal**

- Adisetiawan, R. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(3), 669-681.
- G.H Addink, 2003. "From Principles of Proper Administration to Principles of Good Governance", diktat Good Governance, hlm. 9. CLGS-FHUI, Depok.
- Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi Hand Arrest Operation In Handling Corruption Case. *Negara Hukum*, 9(1).
- Kurniasih, D. (2017). Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung. *Jurnal Transformativ*, 3(1), 1-15.
- Muslih, N. P. M. (2021). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cimahi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Siregar, Muhammad Arifin. 2008. Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Propinsi Bengkulu. Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Yarni, Meri dan Latifah Amir. 2014. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Page: 120-138.
- Yunus, N, R. 2016. Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. Volume 3 Nomor 1

### **Internet**

- Frinady, B. 2018. Menuju Clean Government Dalam Negara Demokrasi. Diakses dari <https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/menuju-clean-goverment-dalam-negara-demokrasi/>
- Wahyudi, I. 2022. Good Government dan Clean Government. Diakses dari <https://islamiccenter.uad.ac.id/good-government-dan-clean-government/>

### **Undang-undang**

- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme